



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL**



KENDAL BERDIKARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang terjadi dalam tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan, perubahan asumsi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, perubahan kondisi dan kebutuhan organisasi, serta penyesuaian terhadap kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara efektif, efisien, terarah, dan akuntabel.

Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026 tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen perencanaan strategis BPKAD Kabupaten Kendal. Penyusunannya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

BPKAD Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pengelolaan aset daerah yang semakin optimal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Kendal serta memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun 2026.

Kendal, 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



ABDUL WAHAB, S.Sos., MIDS, M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731021 199703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	23
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026	28
3.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan yang Mengalami Perubahan	28
BAB IV. PENUTUP.....	40
4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	40
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	41
4.3 Rencana Tindak Lanjut	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 BPKAD
Kabupaten Kendal 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kabupaten Kendal . 16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 23

Tabel 2.4 Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal 23

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal..... 28

Tabel 3.2 Perubahan RKPD Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal..... 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah Pasal 367, disampaikan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD triwulan II dan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Maka, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mendasarkan pada hasil evaluasi Renja PD triwulan II.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan. Perubahan Renja diperlukan untuk memastikan agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan BPKAD tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2025 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Dalam pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah, BPKAD terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Penguatan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya Perubahan Renja tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP). Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan capaian dan proyeksi kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- c. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan lokasi kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- e. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kelompok sasaran kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- f. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan sertamemproyeksi pendanaandalam rangka menyelaraskan dinamika pelayanan sampai akhir tahun anggaran;
- g. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2026 bagi Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, adalah:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan tentang realisasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi penjelasan terkait dengan:

Program, Kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya disertai dengan Lampiran Perubahan RKPD 2026.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan yang Baik, Bersih dan Melayani” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPKAD Tahun 2026. Evaluasi ini juga menjadi bahan dalam melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal di tahun 2026 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih *on the track* dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyedia/penunjang pelayanan publik di bidang umum pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kendal secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan manajemen internal perangkat daerah.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026
BPKAD Kab. Kendal

No	Program / Kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Prosentase Kinerja
1	2	3		4	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	50%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	4	50%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0,5	50%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20	10	50%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	65/8	50%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	1	33,33%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	2	50%
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Paket	12	6	50%
9	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Paket	3	1	33,33%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	1	0	0
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50%
12	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	500	50%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
13	Pengadaan Mebel	Unit	120	50	41,67%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	2	50%
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
15	Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6	50%
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	6	50%
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	6	50%
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	81	30	37,04%

19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	5	41,67%
20	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	0,5	50%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
21	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2	1	50%
22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	0	0%
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	53	20	37,74%
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	53	0	0%
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	0,5	50%
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0%
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12	6	50%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
28	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	6	3	50%
29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan	184	90	32,6%
30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	1	50%
31	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	2	40%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
32	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	79	40	50,63%
33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5	2	40%
34	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	51	20	39,2%

35	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	1	50%
36	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1	50%
37	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	31	15	48,4%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
38	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	266	130	48,9%
39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	0,5	50%
40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Laporan	1	0	0
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
41	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	1	50%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
42	Penyusunan Standar Harga	Dokumen	1	0,5	50%
43	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	1	50%
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0,5	50%
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	0,5	50%
46	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	2	40%
47	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	6	50%
					41,19%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II terhadap target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih terdapat beberapa subkegiatan yang realisasi kinerjanya belum mencapai target kumulatif yang direncanakan sebesar 50%. Kondisi tersebut antara lain terdapat pada subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar 33,33%, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 33,33%, Pengadaan Mebel sebesar 41,67%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 37,04%, serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 41,67%.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa subkegiatan juga belum mencapai target kumulatif Triwulan II, antara lain Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang masih belum terealisasi, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD sebesar 37,74%, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang belum terealisasi, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang belum terealisasi, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar 32,6%, Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan sebesar 40%, Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebesar 40%, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 39,2%, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 48,4%, serta Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar 48,9%.

Selain itu, terdapat beberapa subkegiatan yang belum menunjukkan realisasi sampai dengan Triwulan II, seperti Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan jadwal, kebutuhan, kebijakan, serta siklus penganggaran daerah.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah juga masih mencapai 40%, sehingga belum memenuhi target kumulatif sampai dengan Triwulan II.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 50% atau sesuai dengan target kumulatif sampai dengan Triwulan II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, subkegiatan yang telah memenuhi target antara lain Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, subkegiatan yang telah memenuhi target kumulatif antara lain Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, serta Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa subkegiatan telah memenuhi target kumulatif Triwulan II, yaitu Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Inventarisasi Barang Milik Daerah, serta Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Terpenuhinya target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang direncanakan, didukung oleh koordinasi internal yang cukup baik, ketersediaan sumber daya, serta pelaksanaan monitoring terhadap capaian kinerja secara berkala.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terdapat subkegiatan yang realisasi kinerjanya telah melebihi target kumulatif yang direncanakan, yaitu Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan capaian sebesar 50,63%.

Capaian tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal dibandingkan dengan target kumulatif sampai dengan Triwulan II. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas koordinasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan, kebutuhan percepatan penyelesaian proses penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta dukungan koordinasi yang baik antara BPKAD dengan perangkat daerah dan pihak terkait.

Melebihinya target tersebut merupakan indikasi positif terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, capaian yang melebihi target tetap perlu dikendalikan dan dievaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan perencanaan, kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja pada beberapa kegiatan antara lain:

Karakteristik dan tahapan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti siklus penganggaran daerah dan belum memasuki tahapan pelaksanaan pada Triwulan II, seperti kegiatan yang berkaitan dengan Perubahan KUA-PPAS, Perubahan RKA-SKPD, dan Perubahan APBD.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan tahapan persiapan, antara lain penyusunan spesifikasi, proses pengadaan, pemilihan penyedia, serta penyesuaian dengan kebutuhan perangkat daerah, sehingga realisasi beberapa kegiatan belum mencapai target kumulatif.

Kegiatan yang bersifat insidental atau berdasarkan kebutuhan, seperti pengelolaan dana tertentu, pemeliharaan kendaraan dan peralatan, serta pengelolaan dana darurat, yang realisasinya sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan.

Masih berlangsungnya proses pengumpulan, verifikasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi data, terutama pada kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah, sehingga penyelesaian dokumen dan laporan belum seluruhnya dapat direalisasikan sesuai target kumulatif.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja antara lain adanya perencanaan pelaksanaan kegiatan yang cukup baik, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi antarbidang dan dengan perangkat daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sementara itu, capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pelayanan dan koordinasi, adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, serta komitmen pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan target yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Realisasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum belum memberikan implikasi negatif yang signifikan terhadap pencapaian target Program Renstra BPKAD Kabupaten Kendal, karena sebagian besar kegiatan telah mencapai target kumulatif sebesar 50% dan beberapa kegiatan yang belum mencapai target masih memiliki kesempatan untuk dilaksanakan dan diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Namun demikian, apabila kegiatan yang realisasinya masih rendah tidak segera mendapatkan perhatian dan percepatan pelaksanaan, maka berpotensi mempengaruhi pencapaian target tahunan dan selanjutnya dapat berdampak terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pelaporan keuangan, pembinaan perangkat daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam mendukung sasaran peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, keterlambatan penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan akumulasi pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target Program Renstra dan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, khususnya terhadap kegiatan yang realisasinya masih di bawah target kumulatif, dengan menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih terukur sampai dengan akhir tahun.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik pada tingkat pimpinan maupun masing-masing bidang, untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan sejak dini dan segera menetapkan langkah tindak lanjut.

Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan penyampaian data, dokumen, laporan, rekonsiliasi, verifikasi, dan konsolidasi.

Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tahapan siklus penganggaran daerah, sehingga target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan III dan Triwulan IV dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.

Melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya terhadap kegiatan pengadaan peralatan, perlengkapan, mebel, dan kebutuhan operasional lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan yang bersifat insidental atau berdasarkan kebutuhan, melalui pemantauan kebutuhan secara berkala dan kesiapan administrasi sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan apabila diperlukan.

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan target dan karakteristik pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar penetapan target kinerja lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Melakukan penguatan manajemen risiko pelaksanaan program dan kegiatan, terutama terhadap kegiatan yang memiliki potensi keterlambatan, ketergantungan pada pihak eksternal, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan siklus penyusunan dan perubahan APBD.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kendal telah berjalan cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target kumulatif, kondisi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan kegiatan dan karakteristik siklus penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengendalian yang lebih intensif pada Triwulan III dan Triwulan IV agar seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan mendukung pencapaian sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2026			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2026
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.01	01									
01					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan perangkat daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	01		05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50	4 dokumen	4 dokumen	100
01	2	01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50	8 dokumen	8 dokumen	100

01	2	01		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	0,5	50	1 laporan	1 laporan	100
01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	40 orang/bulan	65 orang / 8 bulan	50	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100
01	2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20 orang	10 orang	50	20 orang	20	100
01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	06		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	3 paket	100
01	2	06		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	2 paket	50	4 paket	4 paket	100
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	6 paket	50	12 paket	12 paket	100
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	3 paket	100
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	0	0	1 paket	0	0
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	06		10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	250 Dokumen	25	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	100
01	2	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Tersedia	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

01	2	07		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 unit	120 unit	50 unit	41,67	0	0	0
01	2	07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	2 unit	50	0	0	0
01	2	08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	08		04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
01	2	09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 unit	81 unit	30 unit	37,04	81 unit	81 unit	100
01	2	09		06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	5 Unit	41,67	12 Unit	12 Unit	100
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,5 unit	50	1 Unit	1 Unit	100
02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01			Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40	5 Dokumen	5 Dokumen	100
02	2	01		01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	1	50	2 dokumen	2 dokumen	100

02	2	01		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	53 dokumen	20 dokumen	37,74	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	53 dokumen	0	0	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	1 dokumen	0,5 dokumen	50	1 dokumen	1 dokumen	100
02	2	01		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	12 dokumen	12 dokumen	100
02	2	02			Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	49 OPD	49 OPD	20 OPD	40,8	49 OPD	49 OPD	100
02	2	02		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50	6 dokumen	6 dokumen	100
02	2	02		05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	84 Laporan	184 Laporan	90 Laporan	32,6	184 Laporan	184 Laporan	100
02	2	02		09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	2 dokumen	2 dokumen	100

02	2	02		10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	40	5 dokumen	5 dokumen	100
02	2	03			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam penyusunan laporan keuangan	51 OPD	51 OPD	25	49,02	51 OPD	51 OPD	100
02	2	03		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	79 Laporan	79 Laporan	40 Laporan	50,63	79 Laporan	79 Laporan	100
02	2	03		03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	40	5 Laporan	5 Laporan	100
02	2	03		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	51 Laporan	51 Laporan	20 Laporan	39,2	51 Laporan	51 Laporan	100
02	2	03		06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	62 orang	31 orang	15 orang	48,4	31 orang	31 orang	100
02	2	04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan penerima DD,ADD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan tak terduga	266 Laporan	266 Laporan	130 Laporan	48,9	266 Laporan	266 Laporan	100

02	2	04		08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	266 Laporan	266 Laporan	130 Laporan	48,9	266 Laporan	266 Laporan	100
02	2	04		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50	1 Laporan	1 Laporan	100
02	2	04		10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100
02	2	05			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	05		02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	2 dokumen	2 dokumen	100
03					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
03	2	01			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
03	2	01		01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,5 Dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100
03	2	01		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100
03	2	01		05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset BMD yang terpeliharanya	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	1 Laporan	1 Laporan	100
03	2	01		06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	1 Laporan	1 Laporan	100
03	2	01		10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 Dokumen	5 Dokumen	100
03	2	01		12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu penegakan kode etik dan integritas serta penguatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta evaluasi kinerja yang berbasis data dan hasil nyata di lapangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan Kabupaten Kendal yang menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan” melalui beberapa rumusan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki Standar Pelayanan dan tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelola ketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 secara umum memperlihatkan hasil kinerja yang cukup optimal, masih *on the track* pada target/proyeksi yang telah ditetapkan.

Perubahan dalam rangka penyelarasan terhadap beberapa program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal difokuskan demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun 2026	Target Renja PD Tahun 2026	Realisasi Capaian Triwulan II Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-		76,83	76,83	64,016*	70,00
2.	Opini BPK	-		WTP	WTP	WTP*	WTP
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	-		100%	100%	100%*	100%
4.	Nilai SAKIP	-		82,35	82,35	78,35	100%
5.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-	√	7,00	5,00	4,00*	5,00
6.	Persentase Penurunan SILPA	-	√	2,53	2,53	-341,02*	-4,00

Keterangan: *Angka capaian tahun 2025, dikarenakan capaian tahun 2026 rilis pada akhir tahun.

2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Berikut disajikan realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026

Tabel 2.4 Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

No	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator	PAGU		Realisasi sampai TW II 2026	Persentase Capaian (%)
			RKPD 2026	APBD 2026		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	10.069.035.487	10.230.361.168	4.123.717.058	40,31
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.730.000	57.500.000	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.230.000	0	0	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	7.737.132.987	8.294.932.168	3.496.287.020	42,15
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.737.132.987	8.294.932.168	3.496.287.020	42,15
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	0	0	0	0
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	1.397.646.000	1.094.566.250	359.609.673	32,85
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102.725.000	111.565.000	34.459.300	30,89
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22.043.000	15.418.000	6.895.500	44,72
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65.000.000	65.000.000	13.386.000	20,59
9	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75.791.000	75.791.000	20.500.675	27,05
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.000.000	0	0	0
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.038.087.000	775.903.000	266.293.402	34,32
12	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	91.000.000	50.889.250	18.074.796	35,52
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	116.000.000	33.500.000	20.812.500	62,13
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16.000.000	25.000.000	20.812.500	83,25
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.000.000	8.500.000	0	0
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.106.500	411.282.750	153.772.939	37,39
15	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	12.500.000	2.373.000	18,98
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	290.650.000	286.093.000	100.239.939	35,04
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	173.456.500	112.689.750	51.160.000	45,40
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	266.920.000	338.580.000	93.234.926	27,54

18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136.500.000	136.500.000	44.069.926	32,29
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105.420.000	132.080.000	49.165.000	37,22
20	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25.000.000	70.000.000	0	0
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	424.272.981.805	361.073.019.261	132.318.133.003	36,65
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA)	415.580.000	415.580.000	42.757.200	10,29
21	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	43.520.000	43.520.000	400.000	0,92
21	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	27.300.000	27.300.000	0	0
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36.300.000	36.300.000	2.200.000	6,06
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	16.850.000	16.850.000	0	0
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	116.610.000	116.610.000	40.157.200	34,44
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.000.000	50.000.000	0	0
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	125.000.000	125.000.000	0	0
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	344.676.000	344.676.000	970.000	0,28
28	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	243.840.000	243.840.000	420.000	0,17
29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18.830.000	18.830.000	150.000	0,80

30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.510.000	29.510.000	0	0
31	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	52.496.000	52.496.000	400.000	0,76
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam penyusunan laporan keuangan	142.786.000	136.936.000	1.764.240	1,29
32	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	11.543.000	11.543.000	615.240	5,33
33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86.405.000	86.405.000	150.000	0,17
34	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9.577.000	9.577.000	0	0
35	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.811.000	4.811.000	0	0
36	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	8.029.000	8.029.000	999.000	12,44
37	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	22.421.000	16.571.000	0	0
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan penerima DD,ADD, bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan tak terduga	423.346.239.805	360.152.127.261	132.272.641.563	36,81
38	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	370.667.105.377	321.365.684.300	129.534.239.838	40,31
39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	6.700.000.000	2.738.401.725	40,87
40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	47.679.134.428	31.286.442.961	0	0

	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	23.700.000	23.700.000	0	0
41	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	23.700.000	23.700.000	0	0
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	1.364.827.000	1.357.407.000	234.527.014	17,28
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	1.364.827.000	1.357.407.000	234.527.014	17,28
42	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	303.000.000	303.000.000	0	0
43	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.200.000	11.200.000	0	0
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	475.897.000	475.897.000	8.484.135	1,78
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	39.000.000	39.000.000	0	0
46	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	328.230.000	328.230.000	222.413.879	67,76
47	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	207.500.000	200.080.000	3.629.000	1,81
			435.706.844.292	371.860.787.429	136.676.377.075	36,75

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mendasari Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas BPKAD membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Sehingga BPKAD tidak menampung usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya menunjang kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas teknis lain.

Tabel 2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NIHIL					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target	
				2026	Perubahan 2026
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	64,016	76,83	76,83
2.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	%	100%	100%	100%
4.	Nilai SAKIP	Poin	78,20	82,35	82,35

3.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan yang Mengalami Perubahan

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2026.

Berikut disajikan Tabel Perubahan Renja PD Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Kendal :

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KENDAL
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENIA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENIA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							435.706.844.292,00	372.660.787.429,00	413.293.114.844,00	-22.413.729.448,00							445.837.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							435.706.844.292,00	372.660.787.429,00	413.293.114.844,00	-22.413.729.448,00							445.837.500.000,00	
	5.02	KEUANGAN							435.706.844.292,00	372.660.787.429,00	413.293.114.844,00	-22.413.729.448,00							445.837.500.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawalan serta keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10.069.035.487,00	10.230.361.168,00	9.569.805.012,00	-499.230.475,00					Perangkat Daerah	100 %	11.469.500.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	59.730.000,00	57.500.000,00	50.000.000,00	-9.730.000,00						100 %	110.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		4 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2.230.000,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		8 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7.737.132.987,00	8.294.932.168,00	7.636.876.012,00	-100.256.975,00						100 %	8.700.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	37 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7.737.132.987,00	8.294.932.168,00	7.636.876.012,00	-100.256.975,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		50 Orang/bulan	8.700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00						100 %	55.000.000,00	

5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	20 Orang	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administrasi Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.397.646.000,00	1.094.566.250,00	1.090.682.750,00	-306.963.250,00					100 %	1.529.500.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	102.725.000,00	111.565.000,00	111.565.000,00	8.840.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	3 Paket	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	22.043.000,00	15.418.000,00	11.534.500,00	-10.508.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	4 Paket	29.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Paket	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	75.791.000,00	75.791.000,00	75.791.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	3 Paket	78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 paket	2.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.038.087.000,00	775.903.000,00	775.903.000,00	-262.184.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	91.000.000,00	50.889.250,00	50.889.250,00	-40.110.750,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1500 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	116.000.000,00	33.500.000,00	37.383.500,00	-78.616.500,00					100%	160.000.000,00	

5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	120 Unit	120 Unit	120 Unit	120 Unit	16.000.000,00	25.000.000,00	26.483.500,00	10.483.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	120 Unit	105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	8.500.000,00	10.900.000,00	-89.100.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	4 Unit	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	479.106.500,00	411.282.750,00	411.282.750,00	-67.823.750,00					100%	525.000.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	290.650.000,00	286.093.000,00	286.093.000,00	-4.557.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	290.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	179.456.500,00	112.689.750,00	112.689.750,00	-66.766.750,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	266.920.000,00	338.580.000,00	343.580.000,00	76.660.000,00					100%	390.000.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	81 Unit	81 Unit	81 Unit	81 Unit	136.500.000,00	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	81 Unit	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	105.420.000,00	132.080.000,00	132.080.000,00	26.660.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Unit	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Unit	130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan Persentase Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	424.272.981.805,00	361.073.019.261,00	402.275.902.832,00	-21.997.078.973,00					Perangkat Daerah	100%	432.178.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dok anggaran daerah yang disusun (KUA PPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	415.580.000,00	415.580.000,00	305.580.000,00	-110.000.000,00						5 Dokumen	808.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	43.520.000,00	43.520.000,00	43.520.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		2 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		2 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		53 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		53 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	116.610.000,00	116.610.000,00	116.610.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		1 Dokumen	183.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		2 Dokumen	130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	15.000.000,00	-110.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi		12 Dokumen	295.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang dilina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	344.676.000,00	344.676.000,00	259.676.000,00	-85.000.000,00						49 OPD	340.000.000,00	

5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	243.840.000,00	243.840.000,00	183.840.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	40 Dokumen	235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	84 Dokumen	184 Dokumen	184 Dokumen	184 Dokumen	184 Dokumen	18.830.000,00	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	52 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.510.000,00	29.510.000,00	15.110.000,00	-14.400.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	2 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penastusahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penastusahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	52.498.000,00	52.498.000,00	41.896.000,00	-10.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	5 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam penyusunan laporan keuangan	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	142.786.000,00	136.936.000,00	136.936.000,00	-5.850.000,00					51 OPD	237.000.000,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	79 Laporan	79 Laporan	79 Laporan	79 Laporan	79 Laporan	11.543.000,00	11.543.000,00	11.543.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	94 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	86.405.000,00	86.405.000,00	86.405.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0	51 Laporan	51 Laporan	51 Laporan	51 Laporan	9.577.000,00	9.577.000,00	9.577.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	51 Laporan	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.811.000,00	4.811.000,00	4.811.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.029.000,00	8.029.000,00	8.029.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	4 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	22.421.000,00	16.571.000,00	16.571.000,00	-5.850.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	31 Orang	32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan penerima DD,ADD,bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan	12 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	423.348.239.805,00	360.152.127.281,00	401.467.510.832,00	-21.878.728.973,00					266 Laporan	430.750.000.000,00		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	370.687.105.377,00	321.365.684.300,00	331.727.965.377,00	-38.939.140.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	266 Laporan	360.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	14.467.238.341,00	9.467.238.341,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Laporan	7.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.679.134.428,00	31.286.442.961,00	55.272.309.114,00	7.593.174.586,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Laporan	43.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.700.000,00	23.700.000,00	106.200.000,00	82.500.000,00					2 Dokumen	43.000.000,00		
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.700.000,00	23.700.000,00	106.200.000,00	82.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	2 Dokumen	43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3. 5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.364.827.000,00	1.357.407.000,00	1.447.407.000,00	82.580.000,00					Perangkat Daerah	100%	2.190.000.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.364.827.000,00	1.357.407.000,00	1.447.407.000,00	82.580.000,00						100%	2.190.000.000,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	303.000.000,00	303.000.000,00	393.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	2 Dokumen	23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	475.897.000,00	475.897.000,00	475.897.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Laporan	850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	1 Laporan	82.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	328.230.000,00	328.230.000,00	328.230.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	5 Dokumen	580.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	207.500.000,00	200.080.000,00	200.080.000,00	-7.420.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	12 Laporan	305.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H									435.706.844.292,00	372.660.787.429,00	413.293.114.844,00	-22.413.729.448,00						445.837.500.000,00	

Secara keseluruhan, anggaran BPKAD Kabupaten Kendal mengalami penyesuaian dari Rp435.706.844.292 menjadi Rp413.293.114.844, sehingga terdapat pengurangan sebesar Rp22.413.729.448. Penyesuaian tersebut terutama berasal dari efisiensi anggaran pada beberapa subkegiatan, disertai dengan penambahan anggaran pada subkegiatan yang membutuhkan dukungan pendanaan lebih besar untuk menjamin pencapaian target kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp10.069.035.487 menjadi Rp9.569.805.012, atau berkurang sebesar Rp499.230.475, sedangkan target capaian tetap sebesar 100%. Penyesuaian anggaran dilakukan terutama melalui efisiensi dan penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan administrasi pemerintahan internal BPKAD.

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran berkurang dari Rp59.730.000 menjadi Rp50.000.000. Pengurangan terutama terjadi pada subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target masing-masing tetap dipertahankan, namun anggaran pencetakan dan penggandaan dokumen tidak lagi dialokasikan pada kedua subkegiatan tersebut karena kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui anggaran pada subkegiatan lainnya. Dengan demikian, pengurangan pagu tidak mengurangi target keluaran yang telah ditetapkan.

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu mengalami pengurangan sebesar Rp100.256.975, dari Rp7.737.132.987 menjadi Rp7.636.876.012. Perubahan tersebut terjadi pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai hasil dari efisiensi anggaran dan perhitungan kebutuhan gaji secara lebih presisi. Meskipun pagu berkurang, target pembayaran gaji dan tunjangan tetap dipertahankan.

Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp12.500.000 tidak lagi dialokasikan dalam Perubahan Renja. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang menggunakan anggaran dari BKPSDM, sehingga tidak diperlukan penganggaran kembali pada BPKAD. Penyesuaian ini tidak mengurangi target pengembangan kompetensi pegawai karena kegiatan tetap dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran dari perangkat daerah yang berwenang.

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu mengalami penurunan dari Rp1.397.646.000 menjadi Rp1.090.682.750. Penyesuaian tersebut berasal dari beberapa subkegiatan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mengalami penambahan sebesar Rp8.840.000 sebagai akibat perubahan harga barang. Sebaliknya, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami efisiensi sebesar Rp10.508.500. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak

lagi dialokasikan karena kebutuhan bahan bacaan dapat dipenuhi melalui media internet.

Selain itu, anggaran Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dikurangi sebesar Rp262.184.000 sebagai bagian dari efisiensi anggaran, sedangkan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dikurangi sebesar Rp40.110.750. Dengan demikian, perubahan pada kegiatan administrasi umum lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap kebutuhan riil dan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengganggu kelancaran pelayanan administrasi internal BPKAD.

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu berkurang dari Rp116.000.000 menjadi Rp37.383.500. Penurunan tersebut terutama berasal dari efisiensi anggaran pada pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp89.100.000. Sementara itu, pengadaan mebel mengalami penambahan sebesar Rp10.483.500 karena adanya perubahan harga barang. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual dan perkembangan harga pada saat pelaksanaan pengadaan.

Pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu mengalami pengurangan dari Rp479.106.500 menjadi Rp411.282.750. Pengurangan berasal dari efisiensi penyediaan jasa surat-menyurat, penyesuaian pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berdasarkan kebutuhan riil, serta pengurangan anggaran jasa pelayanan umum kantor karena sebagian tenaga outsourcing telah beralih status menjadi PPPK.

Sementara itu, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan anggaran dari Rp266.920.000 menjadi Rp343.580.000 atau bertambah sebesar Rp76.660.000. Penambahan tersebut terutama disebabkan meningkatnya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin serta bertambahnya pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun pemeliharaan kendaraan dinas tetap menggunakan pagu sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar. Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, pagunya mengalami penurunan dari Rp424.272.981.805 menjadi Rp402.275.902.832, atau berkurang sebesar Rp21.997.078.973, sementara target capaian program tetap sebesar 100%. Perubahan terutama merupakan hasil penyesuaian anggaran pada pengelolaan bantuan keuangan, efisiensi beberapa kegiatan, serta penambahan kebutuhan pada pengelolaan dana darurat dan mendesak serta dana bagi hasil.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, pagu berkurang dari Rp415.580.000 menjadi Rp305.580.000. Meskipun demikian, seluruh target dokumen tetap dipertahankan. Pengurangan anggaran terutama berasal dari subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran,

yang mengalami pengurangan sebesar Rp110.000.000 karena anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis TAPD dihilangkan. Sementara subkegiatan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan PPAS, RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, serta penyusunan APBD dan Perubahan APBD tetap dipertahankan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, anggaran berkurang dari Rp344.676.000 menjadi Rp259.676.000. Penyesuaian tersebut terutama terjadi pada subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah karena adanya pengurangan jasa konsultasi yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran pada rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan. Sementara pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya tetap dipertahankan sesuai target.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, pagu mengalami penurunan dari Rp142.786.000 menjadi Rp136.936.000. Penyesuaian terutama terdapat pada subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk efisiensi anggaran. Adapun subkegiatan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan pemerintah daerah, penyusunan tanggapan atas LHP BPK, serta penyusunan kebijakan dan panduan teknis tetap dipertahankan sesuai target.

Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pagu mengalami penurunan dari Rp423.346.239.805 menjadi Rp401.467.510.832. Perubahan terbesar terjadi pada subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, yang mengalami pengurangan sebesar Rp38.939.140.000 sebagai akibat penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa.

Di sisi lain, subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak mengalami penambahan sebesar Rp9.467.236.341, terutama karena adanya penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk persiapan penanganan bencana. Subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota juga mengalami penambahan sebesar Rp7.593.174.686 sebagai akibat perubahan penghitungan bagi hasil kepada desa. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan fiskal dan kondisi aktual daerah.

Pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, anggaran meningkat dari Rp23.700.000 menjadi Rp106.200.000 atau bertambah sebesar Rp82.500.000. Penambahan tersebut diperlukan karena bertambahnya jenis pemeliharaan jaringan pada implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah. Peningkatan dukungan anggaran ini penting untuk menjamin keberlangsungan

sistem informasi, kualitas layanan, serta kelancaran pengelolaan data keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pagu mengalami peningkatan dari Rp1.364.827.000 menjadi Rp1.447.407.000, atau bertambah sebesar Rp82.580.000. Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan dukungan anggaran terhadap pengelolaan aset daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyediaan data aset.

Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa subkegiatan tetap dipertahankan sesuai target, antara lain perencanaan kebutuhan BMD, penatausahaan BMD, inventarisasi BMD, optimalisasi penggunaan / pemanfaatan / pemindahtanganan / pemusnahan dan penghapusan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dasar pengelolaan BMD tetap menjadi prioritas dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas aset daerah.

Subkegiatan Penyusunan Standar Harga mengalami penambahan sebesar Rp90.000.000 karena adanya kebutuhan tambahan biaya jasa konsultasi terkait aset. Sementara Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp7.420.000 sebagai bentuk efisiensi anggaran. Meskipun terdapat penyesuaian pagu, target pengelolaan BMD tetap diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dan mendukung penyajian data aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, perubahan Renja BPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2026 lebih diarahkan pada penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan riil, efisiensi belanja, perubahan harga, perubahan kebijakan, serta penanganan kebutuhan yang bersifat prioritas dan mendesak. Pengurangan anggaran pada beberapa subkegiatan tidak serta-merta mengurangi target kinerja, karena dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan pelaksanaan dan kemampuan untuk mencapai target dengan sumber daya yang lebih efisien.

Pada saat yang sama, penambahan anggaran diberikan pada subkegiatan yang membutuhkan dukungan lebih besar, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan dana darurat dan mendesak, pengelolaan dana bagi hasil, pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, serta jasa konsultasi terkait aset.

Dengan demikian, Perubahan Renja Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, menjaga kesinambungan pelayanan administrasi pemerintahan, memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas Barang Milik Daerah, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD tetap berjalan secara optimal sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi, kebijakan, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan tahun berjalan. Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 agar tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah dan pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.

4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian.

- a. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus senantiasa memperhatikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kendal. Seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Renja memerlukan koordinasi, sinergi, dan komitmen yang kuat, baik antarunit kerja di lingkungan BPKAD maupun dengan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- c. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan akan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas. Prioritas diberikan kepada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis BPKAD, pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Adanya kebijakan efisiensi anggaran, perubahan regulasi, perkembangan kondisi perekonomian, maupun perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi kualitas pencapaian kinerja yang menjadi prioritas.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia perlu terus dilakukan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, koordinasi, pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi,

termasuk implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan BPKAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaannya, seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Kendal wajib menjadikan Perubahan Renja ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Setiap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus berorientasi pada pencapaian target kinerja, kualitas pelayanan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Efektif, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Efisien, yaitu penggunaan sumber daya dan anggaran dilakukan secara hemat, tepat guna, dan memberikan manfaat yang optimal.
3. Akuntabel, yaitu seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terukur, yaitu setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Terintegrasi dan sinergis, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarbidang serta dengan Perangkat Daerah terkait.
7. Berorientasi pada hasil, yaitu seluruh sumber daya yang digunakan diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan capaian kinerja yang optimal.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Perubahan Renja dan perubahan kebijakan anggaran Tahun 2026.

2. Menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
3. Melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan target kinerja dan prioritas yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan BPKAD serta dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
5. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja.
6. Melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan apabila terdapat hambatan atau permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran.
7. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja dalam seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Kendal pada tahun berikutnya.

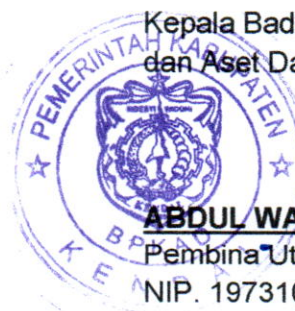
Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, dan partisipasi seluruh aparatur di lingkungan BPKAD Kabupaten Kendal serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Perubahan Renja Tahun 2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026, serta menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Kendal,

2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



ABDUL WAHAB, S.Sos., MIDS, M.Eng.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731021 199703 1 002